

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

**NOTULEN**

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI SATGAS SABER PUNGLI  
PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PARA KEPALA BADAN / DINAS / BIRO  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN OPD SE-BANDUNG RAYA  
DENGAN TEMA “MELALUI SAPU BERSIH PUNGLI KITA WUJUDKAN  
BIROKRASI BEKERJA TANPA PUNGLI”**

I. PEMBUKAAN

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Kamis, 12 September 2019

Jam : Pukul 08.00 Wib s.d Pukul 16.00 Wib

Tempat : Hotel Puri Khatulistiwa Jl. Raya Jatinangor No. 208 C  
Rt 02 Rw 02 Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang  
Prov. Jawa Barat

Pimpinan : Ketua Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Prov.  
Jabar Dr. Ir. M. Taufiq Budi Santoso, M.Soc. Sc.

Narasumber : Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Prov. Jabar Prof.  
Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., Sekretaris III Satgas  
Saber Pungli Prov. Jabar Jaksa Madya Otong Hendra  
Rahayu, S.H., M.H., Kabid Ops Satgas Saber Pungli  
Prov. Jabar AKBP Harso Pudjo Hartono, S.H.

Peserta Sosialisasi : Para Kepala Badan / Dinas / Biro Pemerintah Provinsi  
Jawa Barat dan OPD se-Bandung Raya yang  
seluruhnya hadir berjumlah 200 orang.

II. PELAKSANAAN .....

## II. PELAKSANAAN

- A. Laporan Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli yang dibacakan oleh Sekretaris II AKBP Dr. A. Rusman, S.H., M.H.
- B. Sambutan Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan kepada Kepala Bapped Prov. Jabar Dr. Ir. M. Taufiq Budi Santoso, M.Soc. Sc. selaku Ketua Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, yang intinya sebagai berikut:
  1. Pemerintah terus berupaya untuk pemberantasan praktek pungutan liar (Pungli) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, agar supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
  2. Program-program yang menjadi prioritas dalam pemberantasan praktek pungutan liar ini, bertujuan :
    - tertanggulangnya praktek Pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
    - terbangunnya perubahan *mindset* aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip *Zero Pungli*. namun, tetap mengutamakan pelayanan prima;
    - terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk Pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.
  3. Laporan pengaduan melalui aplikasi Siberli dari mulai di-*launching* oleh Bapak Gubernur Jawa Barat sampai dengan saat ini, sudah terdapat 27 pengaduan, dan 4 yang sudah ditindaklanjuti. Oleh karena itu, dengan Sistem Informasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Siberli) ini, dapat memudahkan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan pengaduan tindakan pungutan liar secara efektif dan efisien berbasis *online*.;

4. Melalui .....

4. Melalui sosialisasi pencegahan Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat pada sektor pelayanan publik se-Bandung Raya, dapat memberikan manfaat :

- menurunkan tingkat terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki resiko terjadinya Pungli;
- meningkatkan organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

C. Paparan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Prov. Jabar yang disampaikan oleh para Narasumber dengan moderator Kelompok Ahli UPP Prov. Jabar Bpk. Drs. H.M.S. Iriyanto, sebagai berikut:

1. Paparan yang disampaikan oleh Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Prov Jabar Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., yang intinya sebagai berikut :

- a. Dua puluh tahun setelah reformasi 1998 berlalu, terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa KKN belum dapat terealisasikan dengan baik.
- b. Dampak korupsi pada tataran perekonomian mikro:
  - menurunnya kualitas taraf hidup rakyat;
  - sulitnya upaya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi;
  - meningginya pola pengeluaran masyarakat;
  - tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk;
  - menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi dan industri.
- c. Dampak korupsi pada tataran ekonomi makro:
  - Merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional
  - Semakin tinggi tingkat inflasi

- Semakin .....

- Semakin rendahnya kinerja investasi nasional
  - Nilai tukar mata uang rupiah merosot
  - Semakin rendahnya kinerja perbankan nasional
- d. Pungli:
- pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya;
  - sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh orang kepada pihak lain.
- e. Pemerintahan Joko Widodo menerbitkan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli.
- Saber Pungli Pusat merekomendasi pembentukan UPP di K/L dan Daerah, pemberantasan Pungli secara efektif dan efisien.
  - Terwujudnya pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar.
- f. Prinsip Dasar 1. Bekerja Tanpa Pungli
- Penyelenggaraan layanan publik yang bermutu dan akuntabel:
- 1) bermutu, artinya pelayanan publik yang melebihi harapan (*beyond the expectation*);
  - 2) akuntabel, artinya :
    - taat terhadap aturan;
    - dikerjakan oleh ahlinya;
    - berorientasi kepada mutu layanan publik yang lebih baik dari waktu ke waktu
- g. Prinsip Dasar 2. Bekerja Tanpa Pungli
- 1) Aparatur dengan Ciri: Integritas, Profesional, dan Melayani.

2) Tumbuhnya .....

- 2) Tumbuhnya Kultur Kerja Baru:
    - memiliki daya tahan terhadap tekanan yang tinggi (*Endurance*);
    - menjunjung tinggi martabat diri dan institusi (*Dignity*).
  - 3) Hasil yang membanggakan dan berorientasi dan bermental juara;
  - 4) Dukungan fasilitas kerja pada Era Generasi 4.0;
  - 5) Kesejahteraan aparatur beserta keluarganya;
  - 6) Lembaga berperan sebagai tempat pembelajaran dan sebagai rujukan.
- h. Mitra Saber Pungli Jabar, mampu tiga M: Mandiri, Mengembangkan diri, dan Melapor.
  - i. Tiga kondisi pendorong utama terjadinya Pungli oleh seseorang, yaitu ada kesempatan, niat diri, dan tekanan eksternal.
2. Paparan yang disampaikan oleh Kabid Ops Satgas Saber Pungli Prov. Jabar AKBP Harso Pudjo Hartono, S.H., yang intinya sebagai berikut :
    - a. Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
    - b. Fungsi-fungsi Satgas Saber Pungli:
      - Pokja Intelijen;
      - Pokja Pencegahan;
      - Pokda Penindakan; dan
      - Pokja Yustisi.
    - c. Tugas Satgas Saber Pungli, melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
    - d. Wewenang .....

d. Wewenang Satgas Saber Pungli:

- membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- melakukan Operasi Tangkap Tangan;
- memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah; dan
- melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

e. Sasaran Kegiatan Satgas Saber Pungli:

- Sektor Pelayanan Publik;
- Sektor Export dan Impor;
- Sektor Penegakkan Hukum;
- Sektor Perijinan;
- Sektor Kepegawaian;
- Sektor Pendidikan;
- Pengadaan barang dan jasa;
- serta kegiatan Pungli lainnya.

f. Target .....

- f. Target Kegiatan Satgas Saber Pungli:
- Aparatur Negara yang bertugas pada sektor pelayanan;
  - Aparat Penegak Hukum;
  - Aparatur Negara sebagai calo / makelar kasus;
  - Aparatur Negara sebagai *backing* dalam Pungli;
  - Mafia hukum dan mafia pajak;
  - oknum masyarakat yang terkait Pungli.
3. Paparan yang disampaikan oleh Sekretaris III Satgas Saber Pungli Prov Jabar Jaksa Utama Madya Otong Hendra Rahayu, S.H., M.H., yang intinya sebagai berikut :
- a. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup, akibatnya masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik Pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. Praktik Pungli semakin membudaya dan tak terkendali, budaya ini sudah merasuk ke hampir semua instansi yang melayani urusan dan kepentingan publik, baik instansi di tingkat pusat maupun di daerah, para oknum di instansi itu sepertinya saling berlomba untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan jabatan yang ada pada dirinya, baik yang dilakukan sendiri maupun berjamaah;
  - c. Siklus kehidupan yang membutuhkan pelayanan publik rentan terhadap Pungli, mulai dari lahir sampai kematian, diantaranya pengurusan akta kelahiran, pendaftaran dan biaya sekolah, pengurusan KK, KTP, SIM, mencari pekerjaan, pengurusan pernikahan, pengurusan skeep jabatan, surat pensiun dan pengurusan surat kematian.

d. Faktor .....

- d. Faktor – faktor penyebab Pungli secara umum:
- 1) penyalahgunaan wewenang, jabatan adalah kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan Pungli;
  - 2) faktor mental, karakter adalah kelakuan dari pada seseorang dalam mengontrol dirinya sendiri;
  - 3) faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas / jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan Pungli;
  - 4) faktor kultural dan budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan Pungli sebagai hal biasa;
  - 5) terbatasnya sumber daya manusia;
  - 6) lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.
- e. Upaya Pencegahan Praktek Pungli:
- 1) pre-emptif, meliputi membangun budaya anti Pungli dan meningkatkan sosialisasi;
  - 2) preventif, meliputi pemetaan rawan pungli, pengawasan internal, dan sistem pelayanan publik berbasis IT;
  - 3) menindak tegas oknum aparat dan masyarakat.
- f. Dalam melaksanakan pemberantasan Pungli, Satgas Saber Pungli sangat mengandalkan peran aktif masyarakat.

- D. Pandangan dari peserta Sosialisasi Satgas Saber Pungli sebagai berikut :
1. Bpk Juhana Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung, yang intinya sebagai berikut :

Perlu .....



Perlu penguatan dari pemahaman dan definisi yang kuat, sebagai contoh infak masuk pungli atau pungli berkedok infak. Setelah ditelusuri sumber info tersebut dari LSM. Adapula pungli di Dinas Pendidikan yang pelakunya bukan dari tenaga pengajar.

2. Ibu Linda Kepala Dinas Sumber Daya Alr, yang intinya sebagai berikut :

Kemitraan antara Instansi dengan Satgas Saber Pungli untuk menjadi percontohan di lingkungan ke-PU-an.

3. Hendrawan Irbn Inspektorat Kota Bandung, yang intinya sebagai berikut :

Hal-hal yang berkaitan dengan Pungli bisa terhindar dengan penanaman nilai-nilai secara dini dan pemberlakuan sanksi yang menimbulkan efek jera.

4. Ibu Popi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang intinya sebagai berikut :

Senantiasa diingatkan namun terjadi kendala dalam pengawasan di pasar. Bisa bekerja sama dengan Saber Pungli untuk memberikan pencerahan khususnya di pasar. Dikhawatirkan karena mindset yang sudah terbentuk tidak bisa dirubah.

5. Tata Rustandi Sekdis Pemuda dan Olahraga Kab. Bandung Barat, yang intinya sebagai berikut :

Keberadaan Saber Pungli masih kurang, contohnya pemberitaan di media elektronik.

6. Peserta sosialisasi mengajukan pertanyaan, yang intinya sebagai berikut :

Apakah untuk yang dikatagorikan pungli termasuk pula sekolah swasta yang tidak menerima BOS.

E. Tanggapan .....

E. Tanggapan dari Narasumber Satgas Saber Pungli Prov. Jabar, sebagai berikut :

1. Bpk. Drs. H.M.S Iriyanto Kelompok Ahli UPP Prov. Jabar, yang intinya sebagai berikut :
  - a. Untuk kegiatan yang tidak didukung anggaran, bisa memungut uang sumbangan yang dikelola oleh Komite Sekolah yang tidak melibatkan pihak sekolah, dengan tidak ada unsur paksaan bersifat sukarela dan tidak mempengaruhi prestasi akademik siswa sekolah.
  - b. Terkait pungutan di sekolah swasta, tidak masuk kategori pungli apabila ada komitmen dari awal antara pihak sekolah dengan orang tua siswa.
  - c. Akan dibentuk Satgas Pungli di Sekolah yang beranggota siswa sebagai wujud kemitraan.
  
2. Jaksa Utama Madya Otong Hendra Rahayu, S.H., M.H. Sekretaris III UPP Prov Jabar, yang intinya sebagai berikut :
  - a. Terkait pungli di lingkungan sekolah (dinas pendidikan), keberadaan Satgas Saber Pungli jangan dijadikan alasan lingkungan sekolah untuk menghentikan program pendidikan yang diindikasikan pungli.
  - b. Satgas Saber Pungli telah membentuk Forum Group Discussion (FGD) untuk merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk melegalkan program kegiatan pendidikan sehingga tidak dikategorikan pungli.
  - c. Apabila ada oknum yang mencoba mengintimidasi terkait adanya pungli di instansi yang berujung pemerasan, agar dilaporkan ke Satgas Saber Pungli.
  - d. untuk merubah *mindset* agar tidak berperilaku pungli, dapat diupayakan dengan siraman rohani yang dilaksanakan di instansi-instansi.

3. AKBP .....

3. AKBP Harso Pudjo Hartono, SH Kabid Ops UPP Prov. Jabar, yang intinya sebagai berikut :
  - a. terkait kegiatan sosialisasi di pasar, dari pihak dinas dapat bersurat ke Satgas Saber Pungli untuk teknis pelaksanaannya.
  - b. terkait kemitraan sudah direncanakan dan akan segera digulirkan diupayakan secara simbolis diresmikan oleh Gubernur.

### III. PENUTUP

Demikian hasil pelaksanaan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat kepada para Kepala Badan / Dinas / Biro Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan OPD se-Bandung Raya dibuat sebagai pertanggungjawaban tugas.

Bandung, September 2019

SEKRETARIS II  
SATGAS SABER PUNGLI PROV. JABAR

Dr. A. RUSMAN, S.H., M.H.  
AKBP NRP 62070433

**SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

---

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN SOSIALISASI SATGAS SABER PUNGLI  
PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PARA KEPALA BADAN / DINAS / BIRO  
PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT DAN OPD SE-BANDUNG RAYA DI  
JATINANGOR - SUMEDANG**



Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat bertempat di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor Sumedang Jawa Barat



Peserta Sosialisasi meliputi para Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan OPD se-Bandung Raya



Laporan Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Prov. Jawa Barat yang dibacakan oleh Sekretaris II AKBP Dr. A. Rusman, S.H., M.H.



Sambutan Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan kepada Kepala Bappeda Prov. Jabar Dr. Ir. M. Taufiq Budi Santoso, M.Soc. Sc. selaku Ketua Pokja Pencegahan UPP Prov. Jabar, sekaligus membuka acara Sosialisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat





Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Prov. Jabar di Jatinangor Sumedang terdiri dari Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Prov. Jabar Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., Sekretaris III Satgas Saber Pungli Prov. Jabar Jaksa Madya Otong Hendra Rahayu, S.H., M.H., Kabid Ops Satgas Saber Pungli Prov. Jabar AKBP Harso Pudjo Hartono, S.H. dengan moderator Kelompok Ahli UPP Prov. Jabar Bpk. Drs. H.M.S. Iriyanto





**SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGLI  
PROVINSI JAWA BARAT**

## **POKJA PENCEGAHAN**

SATGAS SABER PUNGLI PROV. JABAR

**SOSIALISASI SATGAS  
SABER PUNGLI  
PROV. JABAR  
DI SUMEDANG**



## **LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS**

SUMEDANG, 12 SEPTEMBER 2019